

Teori Konflik dan Dinamika Hubungan antarsuku-Bangsa

Hari Poerwanto

1. Dinamika Dan Perubahan Sosial-Budaya

Kebudayaan mengenal ruang, tempat tumbuh dan berkembang, serta mengalami perubahan; baik penambahan maupun pengurangan. Manusia tidak berada pada dua tempat dan ruang sekaligus. Ia hanya dapat pindah ke ruang lain pada masa berbeda. Di luar masanya, suatu kebudayaan akan dipandang ketinggalan zaman atau anakronistik, dan di luar tempatnya dipandang asing atau janggal.

Berbagai perubahan sosial dan kebudayaan, dapat berakibat menguntungkan atau sebaliknya. Jika terjadi perubahan, tidak selalu berada pada tingkat yang sama. Pada suatu waktu, terjadi perubahan besar, sedang pada kebudayaan lainnya, hanya mengalami perubahan yang kurang berarti. Upaya mengklasifikasikan informasi yang berkaitan dengan perubahan yang sedang terjadi, merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh para ahli antropologi. Hal ini dimaksudkan agar fenomena perubahan dan stabilitas suatu kebudayaan lebih dapat dipahami, dan menjadi bahan analisisnya.

Dalam hubungan dengan lingkungannya, manusia cenderung memahaminya melalui budaya yang dimiliki; misalnya pengetahuan tentang sistem simbol, pemaknaan dan sistem nilai (Sahlins, 1977). Sementara itu, seringkali pertimbangan praktis juga dijadikan dasar untuk memberikan jawaban atas perubahan yang sedang terjadi (Kessing, 1971). Kebudayaan bukan hanya dikembangkan oleh alam pemikiran manusia, melainkan juga terbentuk dan dihasilkan oleh sistem sosial tertentu. Untuk itu diperlukan perspektif teoritis yang dapat menjelaskan kekuatan-kekuatan pembentuk dan penghambat suatu perubahan. Di satu pihak perubahan dapat dikaji melalui

sistem pemaknaan, dan di lain pihak juga harus memperhatikan sistem hubungan sosial.

Kelompok dan lembaga sosial adalah bentuk struktural dari masyarakat. Dalam menghadapi situasi tertentu, dinamikanya akan tergantung pada pola-pola perilaku para warganya. Dinamika suatu masyarakat tercermin dalam perkembangan dan perubahan yang terjadi, yaitu akibat hubungan orang-perorangan, antar kelompok maupun antara orang-perorangan dengan kelompok. Berbagai bentuk interaksi sosial yang ditandai oleh terjadinya kontak dan komunikasi, merupakan aspek penting untuk mempelajari proses-proses sosial. Apabila terjadi suatu perubahan yang menyebabkan goyahnya sendi-sendi kehidupan yang ada, pengetahuan tentang proses-proses sosial akan dapat dipakai guna memahami perilaku yang akan muncul (Gillin dan Gillin, 1954). Konflik merupakan salah satu bentuk dari proses-proses sosial yang terpenting

2. Potensi Konflik dan Ekspresi Kesuku-bangsaan

Pada akhir-akhir ini, konflik yang berdimensi kesuku-bangsaan merupakan fenomena umum di banyak negara, dan biasanya bersifat *latent*. Melemahnya semangat integrasi dan menguatnya loyalitas serta solidaritas kesuku-bangsaan yang berdimensi politik, sering mencuat ke permukaan. Sebagai akibatnya, kondisi seperti itu tidak jarang menggiring suatu bangsa yang plural ke dalam sikap saling bermusuhan. Pada akhirnya, hal seperti itu akan bermuara kepada terjadinya disintegrasi suatu negara kebangsaan, dengan tuntutan pembagian wilayah sehingga memungkinkan munculnya negara nasional baru yang lebih homogen (Horowitz, 1985). Karenanya suatu kajian berkaitan dengan hal tersebut,

atau mengabaikan masalah kesukubangsaan; dapat menyebabkan terjadinya kejutan dalam gejolak politik.

Selain mencerminkan kekayaan budaya bangsa, eksistensi pluralisme kesukubangsaan di Indonesia juga membawa implikasi dalam kehidupan sosial. Keanekaragaman suku-bangsa dan golongan, selain merupakan kebanggaan, seharusnya juga disadari mengandung potensi konflik.

Untuk menjadi bagian dari masyarakat negara kebangsaan atau *nation state*, ada tiga masalah pokok yang dibahas dalam etnisitas (Horowitz, 1985). Pertama, garis pembatas suku-bangsa di masa lalu yang masih potensial bagi munculnya konflik; misalnya religi, bahasa, dan afiliasi politik. Kedua, apa dan bagaimanakah bentuk-bentuk konflik baru di kalangan mereka; termasuk konflik di kalangan suku-bangsa 'mayoritas' dan 'minoritas'. Apakah mereka saling bertikai karena kebutuhan akan penghargaan (*prestige*), perhormatan (*respect*), hak-hak sebagai warganegara (*civil rights*), kekuasaan politik (*political power*); atautkah berkaitan dengan kesempatan mendapatkan akses di sektor perekonomian (*access to economic opportunity*). Ketiga, studi tentang etnisitas tidak hanya sekedar dikaitkan dengan masalah mengejar kesempatan semata, melainkan harus dikaitkan dengan suatu ideologi dan kepentingan tertentu. Karenanya, ekspresi etnisitas merupakan cerminan revivalisme identitas suatu suku-bangsa, atau yang sering disebut sebagai 'primordialism'; yang dimiliki seseorang sejak lahir atau karena kelahirannya. Identitas yang mendasar dari suatu suku-bangsa tersebut, oleh C. Geertz (1965) disebut dengan '*primordial affinities and attachments*', dan merupakan *candidate for nationhood*'.

Selain itu, studi etnisitas juga sering dikaitkan dengan derajat konformitas dalam suatu proses interaksi sosial di kalangan kelompok sosial tertentu; terutama dalam hal penerimaan norma-norma tertentu. Mitchell (1956), Epstein (1958), Gluckman (1961) dan Barth (1969); sering mengkaitkan kajian etnisitas dengan perbedaan latar belakang kebudayaan dari suatu kelompok tertentu

yang bersumberkan pada aspek *primordial*.

Dalam tulisannya mengenai heterogenitas politik suku-bangsa di Indonesia, William Liddle (1970) mengidentifikasi ada dua jenis penghalang dalam integrasi nasional; ialah (1) yang berakar pada dimensi pembelahan horizontal, yaitu perbedaan suku-bangsa, ras, agama dan geografis; dan (2) pada tingkat vertikal berupa perbedaan latar belakang elite kota yang berpendidikan, dan massa pedesaan yang berpandangan tradisional.

3. Perubahan dan Fungsi Konflik dalam Masyarakat

Menurut Geertz (1963), kekurangan teori fungsional Malinowski dan Radcliffe-Brown dalam menganalisis perubahan, adalah bersumber pada ketidakmampuan mereka memisahkan antara tataran sosial (masyarakat, struktur sosial) dari tataran kultural (sistem gagasan, makna dan simbol). Hal itu tercermin pula pada konsepsi perubahan sosial yang dikemukakan Davis (1960), ia berpendapat bahwa perubahan sosial (*social change*) merupakan bagian dari perubahan kebudayaan (*culture change*). Ini berarti, suatu perubahan sosial baru lah terjadi apabila struktur dan fungsi-fungsi masyarakat telah mengalami perubahan. Sementara itu, pada dasarnya kedua tataran tersebut berada pada derajat yang sama. Penganut paham fungsional Malinowski dan Brown hanya memandang struktur sosial sebagai *mirror image* dari kultur. Agar konsep fungsional dapat diterapkan secara efektif untuk menganalisis perubahan, terutama pada materi yang bersifat historis, sebaiknya dimulai dengan membedakan antara aspek sosial dari aspek kultural kehidupan manusia. Kedua aspek tersebut diperlakukan sebagai variabel bebas tetapi saling terkait.

Dalam antropologi, kata fungsi diartikan untuk menerangkan hubungan yang terjadi antara satu hal dengan hal-hal lain dalam suatu sistem yang terintegrasi. Sebagai contoh, perubahan suatu organisme akan menyebabkan pula perubahan pada beberapa bagian organisme lain. Sebagai akibatnya, perubahan satu

bagian dari organisme, tidak jarang menyebabkan pula perubahan pada seluruh bagian organisme tadi (Spiro, 1953).

Dinamika dan perubahan dalam masyarakat dapat dipahami melalui teori konflik. Pada dasarnya teori konflik tersebut lebih menitik beratkan pada bagaimanakah manusia melakukan proses penyesuaian diri (*social adjustment*) sebagai akibat kontradiksi internal yang terjadi dalam sistem sosial mereka. Sekalipun konflik merupakan proses disosiatif yang agak tajam, tetapi sebagai salah satu bentuk proses sosial, konflik memiliki fungsi positif bagi masyarakat. Melalui suatu konflik, berbagai aspek yang sebelum kurang jelas akan menjadi semakin jelas. Karenanya produk suatu konflik akan dapat dijadikan 'bahan' untuk terjadinya suatu perbaikan.

Apakah suatu konflik akan mengakibatkan sesuatu yang positif atau sebaliknya; tergantung dari (1) persoalan yang dipertentangkan; dan (2) struktur sosial masyarakat yang sedang mengalami pertikaian. Sepanjang pertentangan tadi tidak berlawanan dengan pola-pola hubungan yang telah ditentukan dalam suatu struktur sosial, biasanya suatu konflik akan bersifat positif. Setelah konflik terjadi, cenderung akan terjadi penyesuaian norma-norma dan pola-pola hubungan sosial di kalangan kelompok-kelompok yang terlibat konflik; yaitu sesuai dengan kebutuhan individu maupun bagian-bagian dari kelompok.

Apabila frekuensi interaksi sosial para warga masyarakat tersebut cukup tinggi, terdapat sikap toleransi yang sudah *institutionalize*. Sikap saling toleransi yang telah melembaga ini akan dapat mengeliminasi efek negatif dari konflik; dan bahkan tidak jarang juga mampu menekan munculnya suatu konflik. Sekalipun dalam kehidupan bersama terdapat sesuatu yang dipertentangkan, tetapi karena memelihara hubungan baik telah menjadi kebutuhan umum, maka benih pertentangan tidak akan dibiarkan berkembang lebih jauh. Masing-masing kelompok menyadari bahwa apabila benih-benih pertentangan dibiarkan berkembang, akibatnya akan membahayakan keutuhan kelompok itu sendiri.

Sebaliknya pada masyarakat yang frekuensi interaksi sosial para warganya tidak terlalu tinggi, apabila ada sesuatu yang dipertentangkan, tidak selalu berakibat negatif. Pada umumnya, tipe masyarakat seperti itu, perhatian para warganya tidak hanya terpusat kepada satu jenis pertentangan saja. Apabila terjadi konflik, dianggapnya sebagai suatu upaya mengurangi ketegangan. Selain itu, konflik yang terjadi diupayakan dibatasi pada pokok permasalahan yang menyebabkan munculnya pertikaian tersebut.

4. Teori Konflik dan Perubahan Sosial-Budaya

Untuk memahami konflik yang terjadi pada suatu masyarakat, ada seperangkat konsep dan teori yang dapat dipergunakan. Pada hakekatnya, suatu konflik (sosial) mengandung arti fungsional (Coser, 1973; Dahrendroft, 1973); terutama jika dikaitkan dengan struktur sosial tertentu. Sementara itu, timbulnya saling pertikaian adalah mencerminkan terjadinya proses perubahan sosial. Karenanya, teori fungsional tentang perubahan yang dikembangkan oleh Talcott Parsons (1973), juga dapat dipakai mengkaji keterkaitan suatu konflik dengan fungsi dari suatu stabilitas atau ekuilibrium.

Apabila terjadi konflik dalam masyarakat, maka berarti ada dialektika, dan ada berbagai aspek ganda yang dapat ditemui di sana. Artinya, pada dasarnya secara relatif setiap komunitas adalah terdiri dari konfigurasi unsur-unsur. Setiap unsur yang terdapat dalam suatu komunitas, adalah terintegrasi dengan baik, dan memberikan kontribusi fungsional. Setiap warga masyarakat tunduk pada konsensus yang telah disepakatinya. Selanjutnya, agar seorang peneliti mampu memberikan ketajaman analisisnya, penjelasan atas deskripsinya harus dilengkapi dengan model komunitas yang memiliki sifat-sifat berlawanan dengan model di atas. Dasar asumsi dari model ini juga terdiri dari empat hal; (1) Setiap komunitas itu merupakan subyek dari suatu perubahan; (2) Setiap komunitas pernah mengalami konflik; (3) Setiap unsur yang ada dalam suatu komunitas, memiliki kontribusi yang sama untuk berubah; dan (4) Setiap anggota masyarakat

menyadari bahwa di antara mereka itu saling memiliki perbedaan pandangan.

Pada dasarnya, model pendekatan di atas menempatkan obyek yang ditelitinya pada suatu asumsi bahwa apabila terjadi suatu konflik, maka penyebabnya erat kaitannya dengan situasi faktual yang terjadi. Guna menerangkan hal itu, seorang peneliti tidak hanya harus menjelaskannya secara struktural semata, melainkan juga harus mendasarkan pada suatu asumsi *dichotomy* yang berjalan secara bertahap.

Berbagai tahapan *dichotomy* yang dikemukakan oleh Dahrendorf, memakai pengandaian berupa *imperatively coordinated group*; yaitu suatu konsep yang sering dipergunakan oleh Weber. Dalam konsepsi tersebut terkandung pengertian bahwa di manapun manusia berada, kehidupannya diwadahi oleh suatu organisasi sosial. Karena itulah akan selalu dapat dijumpai tempat seseorang dalam posisi tertentu, misalnya mereka yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Bentuk-bentuk kehidupan dalam bermasyarakat yang mendasarkan 'atas' dan 'bawah', 'kami' dan 'mereka'; mencerminkan adanya pembagian dalam masyarakat yang bersifat universal. Suatu proses berfikir yang mendasarkan pada bentuk-bentuk kehidupan seperti itu, dikembangkan lebih lanjut sebagai model analisis struktural oleh Dahrendorf. Ada kemungkinan, model itu dapat dipergunakan untuk mencari asal-mula suatu konflik, terutama yang dikaitkan dengan berbagai hubungan kekuasaan; melalui unit-unit tertentu dalam suatu organisasi sosial.

Untuk mengembangkan analisis dari teorinya itu, Dahrendorf juga menyusun model konsep berfikir lain. Pertama, dalam setiap *imperatively coordinated group*, pada dasarnya terdapat pemeran kekuasaan positif dan negatif. Masing-masing kekuasaan tersebut, mewakili dua kelompok kuasi (*quasi group*) yang memiliki kepentingan yang berbeda dan saling berlawanan. Pihak yang memiliki peranan positif, cenderung ingin mempertahankan *status quo*; sebaliknya pihak yang memiliki peranan negatif, cenderung ingin merubah *status quo*. Kedua, pihak yang memiliki peranan positif mau-

pun negatif, merupakan anggota kuasi yang saling berlawanan. Kedua belah pihak terorganisasi dalam kelompok-kelompok yang saling memiliki perbedaan kepentingan. Dalam upaya mewujudkan kepentingannya, dapat dilihat dalam berbagai bentuk variabel empirik. Pengertian yang terkandung dalam *interest group* adalah tidak sama dengan *quasi group*. Suatu kelompok *interest* adalah lebih terorganisasi, misalnya dalam bentuk partai politik atau serikat buruh perusahaan. Berbagai kepentingan mereka dirumuskan dalam bentuk ideologi maupun program. Ketiga, pada mulanya konflik yang terjadi adalah berkaitan dengan permasalahan menyangkut 'apakah sesuatu itu' harus dijaga ataukah diubah dari keadaan *status quo*. Bentuk serta intensitas suatu konflik, adalah tergantung pada variabel kondisi empirik atau kondisi suatu konflik. Keempat, apabila terjadi konflik di kalangan kelompok *interest* misalnya, biasanya akan dapat merubah struktur hubungan sosial, yaitu melalui dominasi. Bentuk, kecepatan dan intensitas perkembangan suatu perubahan, adalah tergantung pada variabel empirik atau dapat pula tergantung dari berbagai kondisi perubahan struktural yang ada.

Dengan memahami struktur sosial suatu komunitas maka seorang peneliti dapat mengetahui berbagai bagian dalam suatu komunitas yang masih berfungsi dengan baik. Melalui pendekatan ini, seorang peneliti akan dapat mengetahui apakah suatu konflik yang terjadi disebabkan oleh kondisi historis tertentu; ataukah hanya sekedar merupakan gejala umum dari suatu masyarakat yang sedang berubah.

Selain itu, seorang peneliti harus pula mampu menganalisisnya melalui pendekatan struktural-fungsional. Hal tersebut dimaksudkan guna menemukan tempat suatu kekuatan yang mendorong ke arah terjadinya perubahan sosial. Sekaligus hal ini juga dimaksudkan untuk menjelaskan asal mula terjadinya konflik sosial secara struktural. Selanjutnya, diharapkan teori konflik Dahrendorf mampu menjawab pertanyaan mengenai; (1) Bentuk-bentuk struktur sosial seperti apakah yang memungkinkan timbulnya kelompok-kelompok sosial yang saling

terlibat konflik; (2) Bentuk-bentuk perjuangan apakah yang diinginkan oleh mereka yang saling terlibat konflik; serta (3) Sejauh manakah pengaruh konflik yang ditimbulkan terhadap suatu perubahan struktur sosial.

Model teori konflik Dahrendorf, dapat lebih dikembangkan lagi; yaitu mengkaitkannya dengan teori konflik sosial dari Lewis A. Coser. Teori Coser adalah bertitik tolak dari suatu anggapan bahwa apabila terjadi konflik sosial; maka sebenarnya konflik tersebut erat berkaitan dengan masalah derajat kekakuan suatu kelembagaan. Ini berarti, pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah mencoba melihatnya dalam konteks sistem sosial tertentu. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua sistem sosial mengandung derajat ketegangan konflik yang sama. Sumber dan luasnya cakupan suatu konflik, selalu berubah-ubah, dan tergantung dari tipe struktur sosial serta pola-pola mobilitas sosial. Apakah konflik yang terjadi dapat berfungsi, dan mengakibatkan perubahan sistem sosial lama ke arah terbentuknya suatu sistem sosial baru; sangat tergantung pada derajat kekakuan dan tingkat resistensi sistem sosial itu sendiri. Dengan kata lain, semua itu akan tergantung pada tingkat elastisitas mekanisme kontrol sistem sosial. Jelaslah di sini bahwa derajat kekakuan dan intensitas konflik adalah saling berkaitan. Suatu sistem sosial yang kaku, cenderung menghambat munculnya konflik. Apabila suatu komunitas dengan sistem sosial kaku mengalami konflik, maka akibat yang ditimbulkannya adalah cukup keras. Tidak jarang, akibat yang ditimbulkannya dapat mengarah pada suatu radikalisme. Sebaliknya dalam suatu komunitas dengan sistem sosial yang lebih elastik, suatu konflik diberi kesempatan diekspresikan. Karenanya, jika terjadi konflik dalam komunitas seperti ini, terjadinya pergeseran keseimbangan kekuasaan yang diinginkan tanpa konflik yang eksplosif.

Apabila berbagai masalah yang berkaitan dengan sumber konflik ditelaah lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa munculnya suatu konflik merupakan akibat dari upaya seseorang atau kelompok untuk mendapatkan sesuatu tujuan ter-

tentu. Guna mewujudkan keinginannya, kelompok tadi mendapatkan hambatan. Biasanya, hambatan tersebut berupa penilaian bahwa yang ingin diwujudkannyanya adalah bertentangan dengan sesuatu yang telah mapan (*establishment*). Jika tidak ada suatu institusi yang mampu dipakai untuk mengekspresikan rasa ketidak-puasan tersebut, maka akan timbul aksi dengan mengabaikan atau bahkan meninggalkan norma-norma yang berlaku. Apabila pada akhirnya yang muncul adalah konflik, maka peristiwa itu dapat menjadi titik pangkal atau sumber ke arah terjadinya suatu perubahan; misalnya berupa munculnya inovasi atau terciptanya suatu sistem sosial baru.

Sebenarnya, perubahan dari manapun dan dalam bentuk apapun; akan dapat menimbulkan gangguan suatu keseimbangan. Pada gilirannya, ketidakseimbangan tersebut dapat menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok atau individu-individu yang tidak bersedia melakukan sesuatu terhadap sesuatu yang seharusnya dilakukan atau dikerjakannya. Oleh karenanya, seorang peneliti harus mampu membedakan apakah seseorang yang meninggalkan suatu nilai-nilai lama adalah dalam konteks *deviant*; ataukah keinginan ditinggalkannya nilai-nilai lama itu hanya sebagai akibat tekanan kejiwaan (*stress*). Apabila dalam konteks *deviant*, biasanya konflik yang terjadi akan mampu memunculkan terbentuknya pola-pola dan nilai-nilai baru. Berbagai rasa ketidak-puasan akan tetap disalurkan melalui kelembagaan tertentu yang memiliki fungsi sebagai pelepas perilaku yang menyimpang tadi. Sebaliknya bila karena *stress*, ada kemungkinan timbul konflik lebih merupakan akibat disfungsionalnya suatu sistem sosial. Sekalipun demikian, harus selalu diingat bahwa apabila muncul rasa frustrasi, penanggulangannya tidak selalu dapat diatasi melalui cara-cara seperti itu. Dalam konteks tersebut, komunitas itu sendiri juga harus mampu berperan sebagai obyek untuk mengalihkan terjadinya rasa frustrasi. Apabila hal ini yang terjadi maka suatu konflik akan dapat menyebabkan munculnya pola-pola perilaku baru, atau menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang melanda seluruh anggota ke-

lompok atau komunitas. Jika hal itu yang terjadi maka berarti sistem sosial dari komunitas tersebut memiliki derajat fleksibilitas yang baik bagi terjadinya perubahan. Untuk sampai pada pendapat tersebut, misalnya sejauh manakah setelah konflik berakhir mampu terciptakan akomodasi. Suatu akomodasi adalah ditandai oleh adanya upaya menjaga keseimbangan sistem sosial melalui berbagai proses penyesuaian.

Lebih lanjut, Lewis A. Coser juga berpendapat bahwa apabila suatu komunitas itu terintegrasi dengan baik, maka ada kecenderungan memiliki toleransi atau bahkan membiarkan terjadinya suatu konflik. Sebaliknya, jika komunitas tersebut adalah lemah derajat integrasinya, maka biasanya cenderung bersikap berhati-hati terhadap kemungkinan munculnya suatu konflik. Untuk lebih memahami mengapa suatu perubahan harus terjadi, maka pokok pemikiran Talcott Parsons tentang fungsi suatu perubahan; dapat dipakai untuk lebih memahami terjadinya suatu perubahan. Menurut Parsons, apabila masyarakat mengalami perubahan maka pada gilirannya juga akan terjadi serangkaian upaya untuk menjaga terciptanya keseimbangan. Upaya menjaga keseimbangan tadi, antara lain dengan menelimisasi berbagai sumber konflik.

Guna memahami kerangka berfikir Parsons, ia memulainya dari konsep pangkal mengenai stabilitas atau ekuilibrium yang dinilainya sebagai ciri utama dari suatu struktur sosial. Karenanya, yang harus dilakukan pertama kali oleh seorang peneliti adalah memperjelas pemakaian konsep struktur; yaitu (1) yang menunjuk pada ciri dari suatu sistem, baik secara menyeluruh maupun dalam bentuk sub-sub sistem dalam suatu sistem; dan (2) dalam istilah struktur terkandung pengertian keseimbangan yang stabil, yaitu dalam arti statis (*static*) tetapi juga bergerak (*moving*).

Jika terjadi hubungan antar struktur dan berbagai proses yang berlangsung dalam suatu sistem, pada hakekatnya suatu sistem berada pada keadaan stabil atau relatif seimbang. Hubungan antara sistem dan lingkungannya cenderung menjaga sifat-sifat yang mampu menyeimbangkan. Keadaan hubungan seperti

itulah yang seharusnya diartikan bahwasanya secara relatif suatu struktur adalah tidak berubah. Sementara itu dalam kenyataannya, biasanya suatu sistem adalah dalam keadaan dinamis. Dinamika suatu sistem sangat tergantung dari kontinuitas berbagai proses yang mampu 'menetralisasikan' berbagai sumberdaya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar komunitas tersebut. Jika hal itu berlangsung cukup lama, maka akan dapat mengubah suatu struktur karena proses stabilitas (*stability*) maupun proses penyeimbangan (*equilibrating*), pada hakekatnya adalah mengandung arti berlawanan dengan istilah *proseses* yang biasanya dipakai dalam konteks arti perubahan struktur.

Suatu struktur sosial, dapat dipahami secara formal maupun substantif. Secara formal, suatu struktur merupakan salah satu dari beberapa sistem empirik yang dapat diruntut melalui; (1) unit-unit seperti halnya partikel atau sel; dan (2) hubungan-hubungan terpola diantara unit-unit tersebut seperti halnya tampak dalam hubungan suatu organisasi, hubungan antar jaringan dan hubungan antar organ dalam tubuh manusia. Setiap unit dalam suatu sistem sosial memiliki peranan. Biasanya, peranan yang dilakukan oleh seseorang, erat kaitannya dengan peranan dan kedudukan yang dimilikinya. Berbagai hubungan yang ada dalam suatu sistem struktur, paling tidak berupa pola-pola interaksi yang berpola. Setiap pemeran berfungsi sebagai aktor terhadap lainnya, demikian pula sebaliknya.

Dalam suatu struktur sosial, hubungan berpola adalah bagian dari unsur normatif. Berbagai unsur normatif tersebut berasal dari berbagai pandangan yang tercakup dalam suatu kesatuan pandangan, misalnya mengenai harapan yang melekat dalam diri seseorang atau yang tercermin dalam perilaku anggota komunitas. Harapan tersebut lebih di dasarkan atas suatu anggapan apakah tindakan mereka itu sesuai atau benar; demikian pula sebaliknya. Sementara itu di sisi lain dalam suatu kesatuan yang saling terlibat interaksi, terdapat standar sangsi yang telah dilegitimasi. Sangsi tersebut dapat ditafsirkan positif, dan dapat pula ditafsirkan sebaliknya. Penafsiran atas suatu

sangsi itu adalah tergantung dari sudut pandang kesatuan, dan acuan tertentu. Apabila ada perbedaan yang menyangkut kepentingan semua kolektiva, masing-masing anggota memberikan pandangan mereka yang mengacu pada suatu nilai tertentu, atau norma dan pola-pola hubungan tertentu sesuai dengan peranan mereka dalam kolektiva sosial tersebut. Dalam memberikan batasan pengertian tentang norma, antara lain Parsons mengatakan, "..... *ia a pattrons defining desirable behavior for a unit or class of units in respects specific to it, and differentiated from the obligations of other classes*". Selanjutnya yang dimaksudkan dengan pengertian nilai ialah "..... *ia a normative patterns which defines desirable behavior for a system in relation to its environment, without differentiation i a term of the functions of units or of their particular situations*".

Ada suatu dalil yang mengatakan bahwa pola-pola hubungan dalam suatu sistem sosial adalah bersifat normatif. Pola-pola hubungan sosial yang normatif dalam suatu sistem sosial tersebut adalah juga terdapat dan tercermin dalam kelembagaan yang telah membudaya. Oleh karenanya, stabilitas dari suatu kelembagaan adalah juga stabilitas dari pola-pola normatif itu sendiri. Terdapatnya stabilitas juga mengandung implikasi terhadap tingkat komitmen para anggota kolektiva dalam melakukan tindakan, sekalipun dalam tingkat minimal. Sebagai contoh, tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan yang diinginkan, seyogyanya dihindari karena jika tidak akan diterapkan sangsi, baik itu positif atau sebaliknya. Lebih lanjut Parsons mengatakan bahwa terciptanya pelebagaan sebagai akibat implementasi, merupakan bukti nyata adanya saling memahami tentang sesuatu, dan selanjutnya akan dijadikan sistem acuan dari kolektiva tersebut. Ini berarti bahwa suatu proses pelebagaan nilai dan norma-norma dalam suatu sistem sosial, merupakan indikator adanya keteraturan suatu integrasi.

Arti dari konsep ekuilibrium yang stabil adalah suatu penyelesaian berbagai masalah internal melalui mekanisme integratif. Hal ini dapat dilakukan apabila

melalui mekanisme hubungan yang fluktuatif-adaptif antara sistem dan lingkungannya. Pada gilirannya, terciptanya suatu harmoni juga akan mampu menjaga pola-pola struktural yang utama. Sementara itu harus pula disadari bahwa pengertian ekuilibrium yang stabil dalam perspektif enersia, dapat pula menimbulkan masaalah, terutama jika yang dianggap sebagai gangguan tersebut dinilai 'besar'. Apabila hal itu yang terjadi maka akan ditemui kesulitan untuk menemukan suatu mekanisme kekuatan yang mampu menstabilkan atau menyeimbangkan. Diusulkan oleh Parsons, jika bentuk gangguan yang muncul adalah semacam itu, maka yang harus segera perlu diketahui adalah sejauh manakah 'yang dianggap sebagai gangguan' tersebut berpengaruh terhadap sistem yang ada. Pada tahapan berikutnya harus pula diupayakan suatu prediksi mengenai bagaimanakah bentuk dari sesuatu gangguan yang dianggap dapat mengganggu keseimbangan.

E. Kesimpulan

Upaya memahami keanekaragaman suku-bangsa dan kebudayaan di Indonesia, sekaligus juga berpretensi mengungkapkan berbagai bentuk interaksi sosial yang terjadi di kalangan suku-bangsa yang saling berbeda kebudayaannya. Dengan mempelajari interaksi sosial yang terjadi, diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang proses-proses sosial sehingga akan diketahui segi dinamis dari masyarakat dan kebudayaan. Aspek dinamis dari berbagai perubahan dan perkembangan masyarakat, dimungkinkan dapat terjadi apabila diantara mereka ada interaksi sosial, baik orang-perorangan, orang-perorangan dengan kelompok, maupun antar kelompok manusia. Kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), pertikaian (*conflict*), akomodasi (*akomodation*), asimilasi (*assimilation*), akulturasi (*acculturation*) dan integrasi (*integration*) merupakan proses-proses sosial yang perlu diperhatikan dalam rangka studi hubungan antar suku-bangsa.

Biasanya, suatu masyarakat memiliki 'alat-alat tertentu' untuk menyalurkan benih-benih permusuhan, yaitu berupa *savety-valve institutions*, antara lain

berupa obyek-obyek tertentu yang dapat mengalihkan perhatian berbagai pihak yang sedang bertikai. Agar suatu konflik yang muncul dapat disalurkan dan dikuasai, suatu *safety-valve institutions* perlu dimunculkan.

Konflik yang terjadi pada masyarakat yang memiliki struktur sosial sosial 'terbuka', dapat berfungsi untuk memecahkan dan mengurangi ketegangan, dan pada gilirannya mampu meningkatkan stabilitas dan integrasi. Karenanya, sikap toleran terhadap terjadinya suatu pertentangan amat berguna untuk mengetahui sumber ketidak-puasan dalam masyarakat. Selain itu, konflik juga dapat dianggap sebagai alat untuk menyesuaikan norma-norma ke arah keadaan dan kondisi baru, yaitu sesuai dengan perkembangan yang ada. Selain itu, aktualisasi kehidupan kenegaraan dari suatu bangsa yang beragam suku-bangsanya, seyogyanya didorong agar dapat memberikan kontribusi pada nasionalisme negara kebangsaan daripada primordialisme. Garis isolasi dalam hubungan antar suku-bangsa harus dihilangkan melalui upaya pencarian suatu strategi

Dalam ilmu sosial, dikenal istilah *social planning*. Ini berarti bahwa ada kalanya suatu perubahan sosial dapat pula direncanakan; yaitu selain dapat terjadi sebagai akibat dari sesuatu yang tidak direncanakan. Sekalipun demikian, harus pula disadari bahwa guna mengetahui apakah suatu perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari sesuatu yang direncanakan ataukah sebaliknya; merupakan hal yang tidak mudah, sekalipun bukan berarti tidak mungkin untuk diungkapkan oleh para ilmuwan sosial. Oleh karenanya, penguasaan konsep dan teori yang sekaligus mampu dicerna dengan mengikuti proses berfikir dan metodologi dari disiplin ilmu sosial yang ada,

diharapkan dapat melakukan prediksi, dan sekaligus melakukan *social planning* yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkannya. Dalam melakukan *social planning*, ilmuwan sosial dapat berdasarkan pada proses berfikir induktif maupun deduktif.

Daftar Pustaka

- Coser, L.A., 1973, "Social Conflict and The Theory of Social Change". *Social Change, Patterns and Consequences*, A.E. Etzoini and E. Etzoini (ed.), New York, Basic Books, Hlm.114-122.
- Dahrendorf, R., 1973, "Toward a Theory of Social Conflict", *Social Change, Patterns and Consequences*, A. Etzoini and E. Etzoini (ed.), New York, Basic Books, Hlm.100-113.
- Davis, Kingsley, 1960, *Human Society*, New York, The Macmillan Company.
- Gillin, John Lewis and John Philip Gillin, 1954, "Cultural Sociology", *An Introduction to Sociology*, New York, The Mac Millan Company.
- Geertz, C., 1973, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, New York, Basic Books Inc.
- Gillin, J.L. dan J.P. Gillin, 1954, *Cultural Sociology*, New York, The Mc Millan Company.
- Kessing, R.M. dan F.M. Kessing, 1971, *New Perspectives in Cultural Anthropology*, New York, Holt, Rinehart and Winston Inc.
- Koentjaraningrat, 1981, *Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional*, Tidak Diterbitkan.
- Parsons, T., 1973, "A Functional Theory of Change", *Social Change, Patterns and Consequences*, A. Etzoini and E. Etzoini (ed.), New York, Basic Books, Hlm. 72-86.
- Sahlin, M.D., 1968, "Culture and Environment; The Study of Cultural Ecology", *Theory in Anthropology*, R.A. Manners dan D. Kaplan (ed.), London, Routledge & Kegan Paul, Hlm. 367-373.
- Spiro, M.E., 1953, "A Typology of Functional Analysis", *Explorations*.